

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan I 2026, stabilitas ekonomi Kalimantan Selatan menghadapi tantangan tekanan harga yang tereskalasi, tercermin dari angka inflasi tahunan (*year-on-year*) yang konsisten meningkat dari 4,65% pada Januari, 4,71% pada Februari, hingga menyentuh 4,83% pada Maret. Pendorong utama inflasi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, di mana komoditas pangan seperti ikan nila, telur ayam ras, dan aneka cabai mengalami kenaikan harga signifikan akibat faktor cuaca serta peningkatan konsumsi menjelang Ramadan. Meskipun harga beras lokal masih bertahan tinggi, ketersediaan Beras SPHP sebagai instrumen stabilisasi pasar berhasil meredam gejolak di tingkat konsumen, sementara kenaikan harga emas perhiasan dan penyesuaian biaya pada sektor jasa kesehatan serta pendidikan turut memberikan tekanan tambahan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) di tengah hambatan distribusi logistik laut.

Proyeksi risiko ke depan masih dipengaruhi oleh potensi anomali cuaca yang dapat mengganggu jadwal distribusi di Pelabuhan Trisakti serta lonjakan permintaan musiman selama periode hari besar keagamaan nasional (Idulfitri). Guna memitigasi hal tersebut, diperlukan penguatan koordinasi TPID melalui intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk kelancaran pasokan, serta pengawasan stok di level distributor secara berkala guna memastikan ketersediaan bapokting dan mencegah spekulasi harga di pasar lokal.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Kalimantan Selatan Januari 2026.**

Pada Januari 2026, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,20% (mtm), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi nasional yang mencatatkan deflasi sebesar -0,15% (mtm), serta lebih tinggi dibandingkan inflasi wilayah Kalimantan sebesar 0,17% (mtm). Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,6% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 4,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,66% (yoy).

Kelompok lainnya, perawatan pribadi, dan jasa lainnya menjadi kelompok dengan andil terbesar inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Tekanan pada kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan meningkatnya harga emas global yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dunia dengan adanya isu penguasaan wilayah Greenland oleh Amerika Serikat. Selain itu juga kondisi curah hujan yang sangat tinggi tentunya mempengaruhi produksi dan distribusi barang pokok penting di Kalimantan Selatan.

- **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Kalimantan Selatan Februari 2026**

Pada Februari 2026, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,86% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 0,68% (mtm) maupun inflasi wilayah

Kalimantan sebesar 0,61% (mtm). Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,20% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 4,66% (yoy).

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok dengan andil terbesar inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Tekanan harga pada kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dunia pada isu pembatasan senjata nuklir antara Iran dan Amerika Serikat. Sementara itu pada bulan Februari intensitas hujan juga masih sangat tinggi sehingga mempengaruhi beberapa komoditas bapokting dan mengalami kenaikan.

◦ **Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Inflasi Kalimantan Selatan Maret 2026**

Pada Maret 2026, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi wilayah Kalimantan yang sebesar 0,53% (mtm), namun masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 0,41% (mtm). Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,86% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Selatan pada Maret 2026 tercatat sebesar 4,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,97% (yoy).

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok dengan andil terbesar inflasi Provinsi Kalimantan Selatan. Tekanan harga pada kelompok ini disebabkan oleh peningkatan harga ikan nila akibat kenaikan harga pakan lebih dari 15% serta dampak penurunan pH air dari 6,5 menjadi 2,4 yang menyebabkan matinya ikan budidaya di bantaran Sungai Barito. Lebih lanjut, komoditas telur ayam ras juga mengalami kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan pada periode RAFI (Ramadan dan Idul Fitri) serta terganggunya distribusi telur akibat curah hujan yang tinggi. Selain itu juga inflasi tarif listrik terjadi sebagai low base effect pasca berakhirnya tarif diskon oleh pemerintah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah pada Triwulan I (Januari s/d Maret 2026) menekankan pentingnya penguatan sinergi dalam upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan. Guna mendukung pengendalian inflasi yang berkesinambungan, TPID se-Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memperkuat stabilitas harga dan menjamin kecukupan pasokan pangan di seluruh wilayah melalui implementasi berbagai program strategis, antara lain

◦ **Periode Januari 2026**

◦ **Upaya Keterjangkauan Harga**

1. Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui penyelenggaraan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk komoditas pangan strategis yang dilaksanakan sebanyak tiga kali di Desa Abung, Desa Telang, dan Desa Tungkup, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Selain itu, upaya stabilisasi harga turut diperkuat melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kalimantan Selatan yang telah mencapai 11,91 ribu ton per 26 Januari 2026. Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta meredam tekanan harga pangan di tingkat konsumen.

Pemantauan harga komoditas bapakting di sejumlah pasar melalui Dinas Perdagangan

3.

Provinsi Kalimantan Selatan pasca Nataru 2026.

4. Sidak pasar oleh Satgas Pangan Kalimantan Selatan. Sidak difokuskan pada sejumlah komoditas strategis, antara lain beras, minyak goreng, gula, daging ayam, telur, dan cabai. Satgas Pangan tidak hanya memeriksa harga eceran di tingkat pedagang, tetapi juga memastikan ketersediaan stok di tingkat grosir serta kesesuaian harga dengan harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.

◦ **Upaya Ketersediaan Pasokan**

1. Sebagai upaya peningkatan sektor pertanian daerah, Pemerintah Provinsi telah menyalurkan subsidi pupuk kepada petani di Kabupaten Barito Kuala dengan total alokasi lebih dari 20 ribu ton. Penyaluran ini dirangkaikan dengan kegiatan panen raya padi diatas areal lahan 10 hektar yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan dipusatkan di Desa Baringan Jaya Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, Gubernur Kalsel juga menyerahkan bantuan sektor pertanian dari APBD Provinsi Kalsel senilai hampir Rp2,5 miliar, termasuk dukungan pengelolaan tanaman pangan, dan hortikultura. Penguatan sisi hulu juga dilakukan melalui peluncuran Gerakan Tanam Hortikultura khususnya komoditas cabai dan bawang merah yang didukung dengan pemberian bantuan kendaraan roda tiga oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang kelancaran proses produksi dan distribusi hasil pertanian.
2. Untuk mendorong peningkatan produksi jagung daerah, pada Kuartal I Tahun 2026 di bulan Januari, melaksanakan panen jagung serentak di 12 titik lokasi dengan total luas lahan mencapai 44,2 hektare dan estimasi hasil panen sebesar 176,8 ton jagung yang merupakan hasil sinergi antara Polri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Khusus untuk lokasi panen raya yang dipusatkan di Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, memiliki luas lahan 16 hektare dengan estimasi hasil panen sekitar 64 ton jagung.

◦ **Upaya Kelancaran Distribusi**

1. Sebagai upaya memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar dan sebagian Kota Banjarmasin sehingga distribusi barang dan jasa menjadi terhambat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan dan dilakukan secara merata dan berbasis data yang akurat per rumah tangga. Bantuan tersebut terdiri dari uang tunai Rp.300.000,- per keluarga, paket sembako, perlengkapan balita dan anak, dan obat - obatan. Kegiatan penyaluran bantuan tersebut juga melibatkan Melibatkan BPBD, TNI-Polri, Satpol PP, BEM, serta SKPD terkait untuk memastikan bantuan sampai ke rumah warga. Pemerintah Provinsi juga mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai wilayah yang terdampak banjir agar segera menyalurkan bantuan respons cepat guna memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terpenuhi secara tepat waktu.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan pendataan dan verifikasi intensif terhadap infrastruktur yang rusak akibat banjir yang melanda sebagian besar wilayah Kalsel pada awal Januari 2026. Titik fokus kerusakan pada ruas jalan provinsi dan sistem drainase yang terendam cukup lama, antara lain :Ruas jalan provinsi yang menjadi fokus pengecekan di antaranya jalan Banjarmasin-Martapura, Mataraman-Sei Ulin, Jalan Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan ruas Jejangkit (Barito Kuala). Selain itu juga terhadap berbagai fasilitas

pendidikan yang mengalami kerusakan.

◦ **Upaya Komunikasi Efektif**

1. Mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Daerah secara daring selama bulan Januari 2026.
2. Rapat koordinasi guna membahas strategi pengendalian harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan. Dalam forum tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan, selaku bagian dari TPID Provinsi, berperan strategis dalam memberikan analisis risiko inflasi serta rekomendasi kebijakan berbasis data. Fokus utama pertemuan ini mencakup persiapan teknis pelaksanaan operasi pasar murah yang akan digelar di 52 titik oleh Pemerintah Kota Banjarmasin selama periode Ramadan. Langkah sinergis ini diambil untuk memastikan harga komoditas tetap terkendali, mengelola ekspektasi masyarakat, serta menjamin kecukupan pasokan pangan bagi masyarakat luas.
3. TPID Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan TPID Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi daerah, serta sosialisasi penyusunan pelaporan kinerja pengendalian inflasi daerah.
4. Sosialisasi visual melalui videotron terhadap berbagai komoditas penyumbang inflasi kepada masyarakat.

◦ **Periode Februari 2026**

◦ **Upaya Keterjangkauan Harga**

1. Pelaksanaan Pasar Raya TPID VI Provinsi Kalimantan Selatan resmi dibuka bersamaan dengan pembukaan Pasar Wadai Ramadan 1447 H di kawasan Siring (depan eks Kantor Gubernur). Dalam kegiatan ini, TPID Kalimantan Selatan menyediakan stimulus berupa voucher belanja senilai Rp25.000 per paket bahan pokok bagi masyarakat.
2. Pasar Murah bulan Ramadan melalui Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 13 Kali di 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
3. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk komoditas pangan strategis sebanyak 11 kali pada bulan Februari 2026.
4. Penyaluran Bantuan Pangan (Bapangan) melalui Bulog Kalsel periode Februari dan Maret kepada 362 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai langkah mitigasi risiko lonjakan harga menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
5. Gubernur Kalsel menyalurkan bantuan berkelanjutan berupa paket sembako dan bantuan uang tunai sebesar Rp.200 ribu per rumah bagi warga yang masih terdampak banjir. Bantuan diprioritaskan bagi rumah tangga yang mengalami genangan air cukup dalam dan berdasarkan data yang lengkap.
6. Pelaksanaan operasi pasar/pasar murah melalui Bulog Kalsel sebanyak 30 kali kegiatan yang tersebar di beberapa titik lokasi di Kalimantan Selatan

◦ **Upaya Ketersediaan Pasokan**

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pemulihan lahan pertanian terdampak banjir seluas 12 ribu hektar melalui penyaluran bantuan benih serta pemberian penyuluhan kepada petani dan masyarakat terdampak.
2. Menjelang bulan Ramadan, TPID melakukan pemantauan stok pangan secara langsung di Pasar Sentra Antasari dan Pasar Beras Muara Kelayan untuk menindaklanjuti fluktuasi harga kebutuhan pokok, terutama komoditas cabai. Dalam kegiatan tersebut, TPID turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa bijak dalam berbelanja guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.

Satgas Pangan Polda Kalsel melakukan sidak ke Pasar Kalindo, Banjarmasin. Sidak ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya praktik penimbunan dan untuk memantau stabilitas harga bapokting, khususnya sebagai antisipasi pelaksanaan Haul Akbar Guru Sekumpul dan bulan Ramadhan.

4. Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mencapai 13,20 ribu ton per 16 Februari 2026 guna menjaga daya beli masyarakat.
5. Penanaman Jagung Kuartal I tahun 2026 periode februari pada lahan rawa seluar 11 hektar di Kabupaten Banjar oleh Polda Kalsel, DPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan Kelompok tani. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pasokan jagung dan ketahanan pangan daerah.

◦ **Upaya Kelancaran Distribusi**

1. Optimalisasi upaya pemberian subsidi ongkos angkut melalui skema Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung implementasi Operasi Pasar serta program Gerakan Pangan Murah (GPM) agar harga di tingkat konsumen tetap terjangkau.
2. Mengakselerasi program rehabilitasi dan pembangunan lumbung pangan di berbagai sentra produksi guna memperkuat cadangan pangan daerah dan menjamin kelancaran distribusi bahan pokok secara berkelanjutan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Melakukan pengawasan di pelabuhan/pasar tradisional/pasar besar untuk kegiatan bongkar muat barang khususnya untuk angkutan pangan agar tidak terjadi penumpukan sehingga distribusi tidak terhambat.
4. Memperketat pengamanan dengan bekerjasama aparat keamanan (Polda/TNI) untuk mendukung kelancaran lalu lintas barang dan jasa di bandara, pelabuhan, jalan raya, serta berbagai fasilitas umum lainnya.
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pertamina memperketat pengawasan terhadap LPG 3 KG bersubsidi, baik agen dan pangkalan agar menjual sesuai HET dan memastikan distribusi tepat sasaran.

◦ **Upaya Komunikasi Efektif**

1. Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Perunggasan yang dihadiri oleh para pelaku usaha serta pemangku kepentingan terkait. Pertemuan ini bertujuan strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga komoditas unggas, khususnya daging dan telur ayam ras, menjelang periode Ramadan.
2. Penyebarluasan informasi secara rutin kepada masyarakat terhadap ketersediaan dan harga bapokting melalui media, baik media sosial maupun elektronik. Selain itu juga turut mengedukasi masyarakat terhadap instrumen investasi lainnya selain emas perhiasan, sebagai respon terhadap inflasi Kalsel yang disumbangkan oleh emas perhiasan.
3. Rutin mengkampanyekan gerakan hemat energi kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan Capacity Building Penyusunan Laporan TPID pada 20-21 Februari 2026. Kegiatan ini difokuskan pada penyusunan laporan evaluasi kinerja TPID tahun buku 2025 sebagai bentuk pemenuhan akuntabilitas dan penilaian kinerja pengendalian inflasi daerah sesuai dengan mekanisme pelaporan yang telah ditentukan.

◦ **Periode Maret 2026**

◦ **Upaya Keterjangkauan Harga**

1. Dalam rangka menghadapi HBKN Idul Fitri Tahun 2026 telah dilaksanakan Operasi
- 3.

Pasar Murah untuk komoditas pangan strategis sebanyak 15 Kali di 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang hingga 15 Maret 2026 telah terealisasi sebesar 810 ton, atau sekitar 7,19% dari target tah
3. Selain itu, guna menjaga daya beli masyarakat dan memitigasi dampak lonjakan harga selama Ramadan dan menghadapi hari raya Idul Fitri, Bulog Kalsel telah menyalurkan Bantuan Pangan (Bapangan) periode Februari dan Maret kepada 362 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh kabupaten/kota.
4. Pemerintah Provinsi Kalsel dan Bank Indonesia menyalurkan 1.000 paket sembako gratis bagi masyarakat pada acara Gerakan Pangan Murah (16/03/2026). Paket bantuan tersebut juga disalurkan kepada anak yatim dan penyandang tunanetra sebanyak 450 paket.
5. Pelaksanaan operasi pasar/pasar murah melalui Bulog Kalsel sebanyak 30 kali kegiatan yang tersebar di beberapa titik lokasi di Kalimantan Selatan.

◦ **Upaya Ketersediaan Pasokan**

1. Selama bulan Ramadan 1447 H, pelaksanaan Pasar Raya TPID VI Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk intervensi langsung untuk membantu masyarakat dilaksanakan sampai dengan 18 Maret 2026, dimana menjelang idulfitri tetap mejual berbagai komoditas pangan dengan harga terjangkau, serta LPG 3 KG. Selain itu juga TPID Kalimantan Selatan tetap memberikan stimulus berupa voucher belanja senilai Rp25.000 untuk penebusan paket sembako murah.
2. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3 kali pada bulan Maret 2026.
3. Di sisi hulu, penguatan ketahanan pangan juga menunjukkan capaian positif melalui panen padi perdana di lokasi Cetak Sawah Rakyat (CSR) oleh BBPP Binuang, Kabupaten Tapin. Kegiatan pada lahan seluas 12,5 hektare tersebut mencatatkan produktivitas yang menjanjikan dengan potensi hasil mencapai 5,7 ton per hektare, yang diharapkan dapat memperkuat stok pangan lokal secara berkelanjutan.
4. Penanaman Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 pada periode Maret 2026, sebagai bagian dari program nasional mendukung swasembada yang dilaksanakan di kawasan Bentok, Desa Banyu Hirang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut (7/3/2026). Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan Pemkab Tanah Laut melibatkan kelompok tani setempat dan stakeholder lainnya. Selain itu juga diberikan bantuan bibit dan pupuk.

◦ **Upaya Kelancaran Distribusi**

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan subsidi ongkos angkut berupa Program Mudik Gratis bagi masyarakat. Program ini merupakan bentuk perhatian bagi masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran serta sebagai antisipasi kelancaran distribusi jasa angkutan menghadapi Idul Fitri.
2. Untuk menekan disparitas harga pada pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang momen Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap mengoptimalkan instrumen subsidi biaya angkut melalui skema Fasilitas Distribusi Pangan (FDP).
3. Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Bappeda), Direktorat Jenderal Bina Marga, serta Pemerintah Kabupaten/Kota terkait (5/3/2026), guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur jalan penghubung Banjarbaru – Batulicin (Tanah Bumbu). Sinergi lintas sektoral yang diresmikan menjelang Idulfitri 1447 H ini bertujuan strategis untuk memangkas waktu tempuh logistik dari pusat distribusi ke wilayah pesisir, sehingga stabilitas pasokan pangan tetap terjaga di tengah

peningkatan mobilitas masyarakat.

- **Upaya Komunikasi Efektif**

1. Penguatan koordinasi kelembagaan antar instansi anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya menghadapi HBKN 2026 (Ramadhan dan Idul Fitri) melalui :
 - [High Level Meeting \(HLM\) TPID Provinsi Kalimantan Selatan \(Kalsel\)](#) pada 16 Maret 2026 yang dipimpin Gubernur H. Muhidin dengan fokus pembahasan pada strategi pengendalian inflasi bulan Ramadhan dan menjelang Idulfitri 1447 H. Pertemuan ini menekankan sinergi TPID, BI, dan BULOG untuk menjaga stabilitas harga pangan, komoditas pokok, serta memperkuat ketahanan pangan.
 - HLM TPID dan TP2DD di Kabupaten Tapin pada 7 Maret 2026 yang berfokus pada strategi Stabilisasi Harga Jelang HBKN Ramadhan dan Idulfitri 1447 H.
 - Selain itu, HLM pada 11 Maret 2026 di Kota Banjarbaru dengan penekanan pada tema Sinergi Lintas Sektor Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan Menjelang HBKN Idulfitri 1447 H di Kota Banjarbaru.

Keseluruhan rangkaian pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah intervensi pasar, memastikan ketahanan stok pangan, serta menjaga daya beli masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan selama periode Ramadhan dan Idulfitri.

2. Sosialisasi belanja bijak dalam menghadapi hari raya Idul Fitri melalui media sosial dan elektronik.
3. Mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Daerah secara daring.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2026 menunjukkan performa yang proaktif dan terakselerasi melalui penguatan sinergi strategis dalam menghadapi tekanan musiman pasca Nataru dan periode Ramadhan dan Idulfitri 1447 H. TPID Provinsi Kalimantan Selatan tentunya terus berupaya meningkatkan keterlibatan semua pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pengendalian inflasi daerah, utamanya melaksanakan berbagai koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota IHK maupun non IHK, dan TNI/POLRI serta stakeholder lainnya. Pada kerangka strategi 4K, TPID se-Kalimantan Selatan secara masif menginisiasi kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta penyaluran beras SPHP sebesar 810 ton guna menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat di tengah lonjakan permintaan. Meskipun tantangan distribusi logistik antar-wilayah masih membayangi, efektivitas intervensi yang didukung oleh bantuan pangan kepada 362 ribu KPM serta pemberian subsidi ongkos angkut melalui skema Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) terbukti efektif meredam gejolak harga komoditas *volatile foods*. Program Mudik Gratis juga memberikan kontribusi yang besar untuk menahan inflasi bidang angkutan. Selain itu, komitmen jangka panjang diperkuat melalui langkah strategis seperti rehabilitasi 12 ribu hektar lahan pertanian terdampak banjir, panen perdana program Cetak Sawah Rakyat di Batola dan Tapin, serta akselerasi pembangunan jalan logistik Banjarbaru-Batulicin, yang secara keseluruhan akan berdampak pada inflasi yang tetap stabil dan terjaga dalam sasaran target nasional.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Melaksanakan pemantauan dan peninjauan pasar secara rutin berkala untuk mengetahui kondisi stok berbagai komoditas pokok di Kalimantan Selatan.
- Mengoptimalkan penyampaian laporan harian perkembangan harga barang kebutuhan pokok melalui SP2KP serta memperhatikan secara seksama hasil Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan agar dapat mengambil langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah.
- Sebagai tidak lanjut dari HLM TPID KALIMANTAN SELATAN, maka dibuat surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan tentang Menjaga Stabilitas Harga Dan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Menyambut HBKN (**Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2026**) di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Memperkuat pengawasan barang kebutuhan pokok dengan stakeholder terkait khususnya oleh TPID dan Satgas Pangan yang merupakan kelompok *volatile food* seperti beras, telur ayam, daging ayam ras baik di pasar tradisional, pasar modern maupun tingkat agen dan distributor.
- Tetap melaksanakan Operasi Pasar/Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah menjelang Idul Adha untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
- Melakukan Early warning system cuaca bekerja sama dengan BMKG untuk memprediksi dampak iklim terhadap pangan, dimana mulai periode April telah memasuki musim kemarau (El nino). Untuk itu perlu diantisipasi (gagal panen, puso, kekeringan dan kebakaran lahan) agar mengurangi resiko petani dan produksi pertanian daerah.
- Pengawasan khusus untuk hewan ternak sapi dan kambing yang ada di pasar hewan agar stok hewan kurban mencukupi untuk Idul Adha dan bebas dari penyakit.
- Mengkampanyekan gerakan hemat energi, hal ini perlu dilakukan sebagai antisipasi dampak dari kondisi global yang mempengaruhi harga bbm dan Elpiji di Kalimantan Selatan.
- Mensosialisasikan instrumen investasi selain emas perhiasan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tekanan inflasi yang diakibatkan oleh emas perhiasan di Kalimantan Selatan.
- Peningkatan implementasi program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Kalimantan Selatan dalam rangka peningkatan produksi beras daerah.
- Melaksanakan gerakan menanam tanaman hortikultura untuk menjaga ketersediaan pasokan di daerah (jagung, cabai rawit, dll).
- Percepatan belanja daerah terhadap berbagai proyek strategis pemerintah daerah agar berdampak pada perekonomian di daerah.
- Mendorong TPID Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kerja sama antar daerah guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah.
- Menjaga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi Kalimantan Selatan.
- Meningkatkan koordinasi TPID Provinsi Kalimantan Selatan dengan TPIP dan TPID Kabupaten/Kota agar berbagai kebijakan pengendalian daerah dapat berjalan dengan baik.